

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dimana pembangunan disektor pertanian menjadi prioritas utama bagi pembangunan nasional. Indonesia memberikan komitmen yang sangat tinggi terhadap pembangunan nasional, hal tersebut juga dapat menjadi strategi Indonesia dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang direncanakan oleh Indonesia memiliki tujuan yaitu diharapkan ada pemerataan pembangunan serta hasil-hasil buminya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjaga stabilitas nasional.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi tanaman perkebunan yang peluangnya cukup terbuka lebar di dunia. Hasil dari kelapa sawit yang berupa tandan buah segar (TBS) dapat diolah menjadi minyak kelapa sawit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 1980an, program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) mulai dikembangkan oleh pemerintah. Serangkaian program PIR dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Agribisnis (KKPA) menggunakan bantuan modal asing, maka munculah percepatan pembukaan areal-areal baru.

Program pembangunan perkebunan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) didasarkan pada Kepres No. 1 tahun 1986 bertujuan meningkatkan produksi non migas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang pengembangan perkebunan, meningkatkan serta memberdayakan Koperasi (KUD) di wilayah plasma (Departemen Pertanian, 2008). Perkebunan kelapa sawit rakyat telah berkembang dengan pesat dimulai tahun 1979, dimulai dengan kemitraan inti-plasma dalam pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang dikatakan oleh Bangun (2010) sebagai tonggak perubahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam kemitraan tersebut perusahaan perkebunan besar sebagai inti ditugaskan untuk membina petani pekebun sebagai plasma.

Perkebunan kelapa sawit plasma merupakan perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan kepada Perkebunan Besar Swasta (PBS) maupun Perkebunan Besar Negara (PBN) karena keterampilan petani belum memadai, sedangkan dana ditalangi oleh pemerintah melalui perbankan dalam bentuk kredit. Program ini dimulai sejak tahun 1977 dan dikeluarkannya pola PIR. Implementasi

program tersebut dalam bentuk kemitraan Inti-Plasma dimana perusahaan inti mempunyai peran ganda yaitu sebagai pelaksana dan sebagai inti. (Ditjenbun,1992)

Di Sumatera Barat, PIR-Bun pertama kali dilakukan di Pasaman Barat tahun 1983, dan PIRTrans di Dharmasraya tahun 1986 yang dilanjutkan dengan PIR-KKPA tahun 1992 dan PIR-ABA pada tahun 2000an. Dengan demikian koperasi petani sawit telah ada semenjak tahun 1980an di Sumatera Barat. (Syarfi, 2016)

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya perkebunan rakyat di Indonesia adalah masih rendahnya produktivitas tanaman yang dihasilkan. Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat ini diduga disebabkan oleh tidak dilaksanakannya praktik pertanian yang baik dan praktik manajemen yang baik akibat kurangnya pengetahuan petani dan keterbatasan permodalan yang dimiliki.

Upaya untuk meningkatkan perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep kemitraan antara perkebunan inti dan perkebunan rakyat dengan prinsip saling menguntungkan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Pemerintah mewajibkan kepada setiap perusahaan perkebunan melakukan kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan petani pekebun dengan menerapkan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling tanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Kemitraan usaha pekebun dapat berupa kersama penyediaan sarana produksi, kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, dan kerjasama pendukung lainnya. Salah satu bentuk kemitraan perkebunan adalah usaha perkebunan dikelola oleh koperasi.

Koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia diharapkan tampil sebagai bangun usaha ekonomi yang dominan di dalam perekonomian nasional kita, akan tetapi kenyataannya koperasi belum berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Masyarakat Indonesia perlu diberikan kesadaran bahwa pentingnya berkoperasi.

Koperasi di Indonesia di bidang pertanian, industri, perkreditan dan bidang lain-lainnya harus lebih banyak dan lebih giat lagi memberikan penyuluhan, bimbingan serta pembinaan yang terpadu. (Widiyanti, 2002:39)

Menurut Baga (2005:43) peran koperasi pertanian menjadi penting dalam meningkatkan produksi serta kesejahteraan kehidupan petani, dimana:

- a. Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan *input* produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (*bargaining power*) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi petani.
- b. Dalam hal mekanisme pasar yang tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar.
- c. Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional.
- d. Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi.
- e. Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya.
- f. Berdirinya koperasi sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi para petani anggota maupun masyarakat sekitarnya.

Salah satu koperasi yaitu koperasi serba usaha (KSU). Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya diberbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi serba usaha adalah mensejahterakan anggota koperasi, membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat yang membutuhkan lahan yang luas. Dengan adanya kemitraan antara perusahaan inti dengan koperasi diharapkan dapat menjalankan praktik pengelolaan pertanian yang baik dan praktik manajemen yang baik sehingga produktivitas pertanian sawit meningkat dan juga pendapatan akan meningkat.

Koperasi pada dasarnya merupakan usaha untuk menyatukan kekuatan, meningkatkan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga mampu bersaing dan memiliki posisi tawar ekonomi dengan pelaku usaha lain. Petani kebun kelapa sawit menyatu dalam sebuah koperasi dengan maksud, agar petani memiliki posisi tawar atas harga TBS yang akan dibeli oleh pabrik (inti). Petani menyatu dalam satu kawasan dengan jenis produksi yang sama yakni TBS sehingga mencapai suatu skala ekonomi sehingga kapasitas satu pabrik bisa terpenuhi dan unit bisnisnya bisa berjalan di lokasi perkebunan.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 5,38 sampai dengan 10,96 persen per tahun. Pada tahun 2016 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 11,2 juta hektar, meningkat menjadi 14,04 juta pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 25,41%. Pada tahun 2018 luas lahan perkebunan kelapa sawit 14,32 juta hektar meningkat pada tahun 2019 menjadi 14,67 juta hektar terjadi peningkatan sebesar 2,44% (Direktorat Jendral Perkebunan,2019).

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas areal lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 378.440 ha, tahun 2017 sebesar 478.317 ha,tahun 2018 sebesar 492.666 dan pada tahun 2019 sebesar 508.974 ha. Dalam produksi, kelapa sawit di Sumatera Barat menunjukkan hasil yang meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari hasil produksi yang di tahun 2016 yaitu sebesar 1.183.058 ton dan hasil produksi di tahun 2019 mencapai 1.689.656 ton (Lampiran 1).

Kelapa sawit menjadi produksi perkebunan terbesar di Pesisir Selatan (Lampiran 2). Pada tahun 2017 total produksi kelapa sawit Kabupaten Pesisir

Selatan sebanyak 195.416,4 ton. Terdapat 3 kecamatan yang memiliki luas tanaman kelapa sawit terbesar di Pesisir Selatan yaitu Kecamatan Silaut seluas 7.410 Ha dengan jumlah produksi 61.331 ton, Kecamatan Lunang seluas 6.122 Ha dan jumlah produksi 29.860,6 dan Kecamatan Airpura seluas 5.592 Ha dengan jumlah produksi 29.804,5 ton (Lampiran 3).

Salah satu mitra perusahaan adalah koperasi. PT.Incasi Raya adalah salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. PT.Incasi Raya menerapkan sistem kemitraan dengan masyarakat sekitar untuk membangun perkebunan kelapa sawit masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa.

Namun tidak semua petani kelapa sawit yang berada di Nagari Tluk Kualo yang tergabung ke dalam anggota koperasi. Menurut hasil wawancara dalam penelitian pendahuluan salah satu pengurus KSU Taqwa hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan kepercayaan petani sawit terhadap pentingnya peran koperasi dan bermitra. Dalam kemitraan ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa yang mengelola perkebunan anggota koperasi tersebut. Pada tahun 2017 Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa mendapatkan penghargaan dari Bupati Pesisir Selatan sebagai Koperasi Pengelolaan PIR Kelapa Sawit Terbaik di Kabupaten Pesisir Selatan. (Lampiran 13)

Menurut Wardoyo, 1980 pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenyataannya dilapangan lahan-lahan yang ditanami kelapa sawit tidak dikelola dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani dalam teknik budidaya kelapa sawit sehingga berdampak terhadap produktivitas serta kualitas dan kualitas tandan buah segar kelapa sawit.

Pengelolaan kelapa sawit sangat penting untuk diperhatikan, hal ini berkaitan dengan produktivitas dan kualitas dari hasil tandan buah segar (TBS). Apabila TBS tidak berkualitas maka dapat mempengaruhi harga jual dari TBS tersebut dan berdampak terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Sehingga pengelolaan ini sangat erat kaitannya dengan harga jual yang berkaitan langsung terhadap pendapatan petani kelapa sawit.

Maka penting dilakukan penelitian perbedaan pengelolaan serta pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit anggota dan non-anggota koperasi serba usaha Taqwa . Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengelolaan dan pendapatan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit antara anggota dan non-anggota KSU Taqwa.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat salah satunya di Kecamatan Airpura. Perkebunan rakyat maupun perkebunan perusahaan kelapa sawit banyak terdapat di Kecamatan Airpura ini. Pada tahun 2018 terdapat 38.286 Ha luas tanam dengan produksi 1.995.416 ton. Pada umumnya masyarakat di kecamatan ini mempunyai kebun sawit sendiri untuk masing-masing rumah tangganya.

Usaha perkebunan rakyat di Kecamatan Airpura ini ada beberapa yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa yang berada di nagari Tlk. Kualo. Berdasarkan survey terdahulu yang dilakukan dengan sumber salah satu pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa bahwa perkebunan kelapa sawit ini terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, walaupun luas lahan yang diusahakan kecil yaitu seluas 283,3 ha tetapi hasil TBS yang didapat cenderung meningkat setiap tahunnya (Lampiran 4). Hasil dari TBS ini akan dijual kepada perusahaan yang ada di kecamatan Airpura yaitu PT.Incasi Raya yang mengolah TBS menjadi CPO. Kegiatan budidaya dijalankan mulai dari penggunaan bibit unggul yang sudah bersertifikasi dengan jenis bibit yang bervariasi mulai dari sopin, socfindo dan lain-lain, penanaman, penyediaan alat-alat pemeliharaan sawit, hingga masa panen. Kegiatan budidaya yang baik dan benar akan menghasilkan TBS yang berkualitas baik, meningkatkan nilai jual TBS dan meningkatkan pendapatan dari anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa.

Usaha perkebunan kelapa sawit non-anggota koperasi saat dilihat dilapangan berbeda jauh dengan perkebunan anggota koperasi. Usaha perkebunan non-anggota tersebut kurang maksimal pertumbuhannya dapat dilihat dilapangan bentuk kelapa sawit non-anggota tersebut kerdil. Hal ini bisa disebabkan oleh pemilihan bibit yang tidak bagus (tidak bersertifikat) serta pengelolaan yang kurang maksimal seperti penggunaan pupuk dan pestisida. Sehingga sangat berdampak

terhadap kualitas TBS yang memiliki harga jual yang rendah dibandingkan dengan harga jual usaha perkebunan anggota.

Harga jual yang ditawarkan PT.Incasi raya menurut sumber Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa pada bulan Januari-Juni 2020 harga yang didapatkan oleh Koperasi rata-rata seharga \pm Rp.1.700/kg TBS sedangkan untuk non-anggota koperasi mendapatkan harga \pm Rp.1.000/kg. Hal ini sangat berdampak terhadap pendapatan yang diterima dari anggota dan non-anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa.

Oleh karena itu, pengelolaan dari perkebunan kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap kualitas TBS yang dihasilkan dan hal tersebut sangat berdampak terhadap pendapatan dari petani usaha perkebunan. Usaha perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki karakteristik yang sama dengan usaha agribisnis lainnya. Selain terpengaruhnya terhadap lingkungan eksternal seperti lingkungan, cuaca, iklim, tanaman perkebunan merupakan produk yang membutuhkan lahan yang luas. Hal ini membuat usaha perkebunan kelapa sawit rakyat membutuhkan investasi dan biaya pengelolaan yang besar. Agar suatu investasi dan biaya pengelolaan tidak mengalami kerugian dan memberikan keuntungan yang maksimal maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan pertanyaan penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perbandingan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit anggota dan non anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagaimana perbandingan pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit anggota dan non anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pengelolaan dan Pendapatan Usaha Perkebunan Sawit Anggota dan Non-Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa Di**

Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis perbandingan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit anggota dan non-anggota KSU Taqwa di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menganalisis perbandingan pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit anggota dan non anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Taqwa di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat yang efektif dan efisien melalui kemitraan khususnya kelapa sawit.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.
3. Sebagai bahan studi, referensi, dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

